

Pilkada Serentak: Petakan Potensi Sengketa Penetapan Calon

18 Agustus 2015 - Badan Pengawas Pemilu harus mulai memetakan potensi sengketa pemilihan kepala daerah menjelang penetapan pasangan calon pada 24 Agustus. Ini penting untuk mencegah ketidaksinkronan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu antardaerah untuk jenis kasus/pengaduan yang serupa.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi, Senin (17/8), mengatakan, pemetaan penting dilakukan karena akan menjadi basis pemberian rekomendasi oleh Panwaslu dan Bawaslu. Pemetaan sudah dapat dilakukan di 256 daerah, khususnya di daerah yang tidak memiliki calon perseorangan. Di daerah tersebut, proses verifikasi sudah selesai pada 14 Agustus.

"Kalau sebelum penetapan Bawaslu sudah punya peta, mereka akan punya waktu untuk mengoordinasikan seluruh jajarannya dan mempelajari kasusnya seperti apa sekaligus mempersiapkan pemecahannya. Dengan begitu, Bawaslu sudah punya antisipasi," kata Veri.

Ia khawatir, tanpa koordinasi, Panwaslu akan memberikan rekomendasi yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat memicu ketidakpercayaan kepada Bawaslu.

Sementara itu, komisioner Komisi Pemilihan Umum, Arief Wibowo, mengatakan, KPU daerah siap membuka kembali pendaftaran pasangan bakal calon jika ditemukan calon kurang dari dua pasang setelah penetapan 24 Agustus mendatang. Pembukaan pendaftaran kembali dilakukan sekali setelah penetapan. Apabila pasangan calon masih belum mencapai jumlah minimal dua pasangan calon, pilkada di daerah itu ditunda hingga 2017. Dari Surabaya, Jawa Timur, dilaporkan, hingga kemarin keberadaan surat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional untuk pasangan calon kepala daerah Kota Surabaya, Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid, masih belum jelas. Namun, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Jawa Timur Suyoto menyatakan bahwa surat tersebut ada. Jaminan serupa diberikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat sekaligus Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Sumber: Kompas)